



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA - SKPD)

TAHUN 2021



DINAS SOSIAL

KABUPATEN FLORES TIMUR

Jln. T. M. P. Lapak Tana Nomor : - Telp / Fax (0383) 21033

LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan penyertaanNya sehingga Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Renja merupakan kebijakan pembangunan tahunan yang memuat kerangka prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Dokumen tersebut telah ditetapkan oleh Bupati Flores Timur nomor : 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijadikan acuan dan pedoman dalam penyempurnaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta sebagai landasan penyusunan kebijakan umum APBD dan PPAS dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2021. Renja ini disusun melalui sebuah proses yang cukup panjang sejak perumusan rencana awal pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten di Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2020.

Dalam konteks yang demikian Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini dibuat sebagai rancangan awal sekaligus acuan bagi Pemerintah Daerah dalam membangun daerah ini kedepan, khususnya dalam Urusan Sosial yang merupakan tupoksi dari Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

Meskipun Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini telah berhasil disusun, namun tetap terbuka bagi siapa saja untuk memberikan kritikan yang kiranya akan mencapai kesempurnaan dalam pelaksanaannya di masa mendatang.

Muda – mudahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD memberikan informasi / gambaran kepada Pemerintah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Kiranya Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu memberkati kita semua.

Larantuka, 30 September 2020

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,

ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19670420 199703 1 008

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019	5
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	9
1. Tujuan	9
2. Sasaran.....	9
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2021.....	12
BAB V PENUTUP	18

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan mengacu pada Peraturan Bupati Flores Timur No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial kabupaten Flores Timur.

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 adalah melaksanakan upaya-upaya pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat mempunyai Visi “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG BAHAGIA DAN SEJAHTERA ” dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas Karang Taruna dalam mendukung pencapaian visi Bupati Flores Timur “Selamatkan Orang Muda Flores Timur”;
2. Optimalisasi peran Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam mendukung capaian kinerja organisasi;
3. Meningkatkan pelayanan untuk pemenuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4. Merevitalisasi peran panti dalam upaya peningkatan kapasitas pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Dalam upaya mencapai visi dan misinya sangat tergantung pada sumber daya manusia yang berkualitas, dan didukung dengan dana serta sarana prasarana yang tersedia.

Rencana Kerja (RENJA) 2021 Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam upaya pengintegrasian dari Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3) huruf “b” bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2005 Pasal 55 ayat (6), bahwa "Apabila pasangan calon terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, visi, misi dan program menjadi dokumen resmi daerah". Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra OPD harus memperhatikan hasil evaluasi pencapaian Renja OPD sebelumnya yang telah ditetapkan

Dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah dokumen kerja Dinas/OPD untuk masa kerja 1 (satu) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa satu tahun tersebut OPD berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027.
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah tersedianya suatu dokumen yang strategik dan komperhensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

Dengan demikian dokumen ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Sosial, Kabupaten Flores Timur serta penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selama satu tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I memuat Pendahuluan mencakupi latar belakang penulisan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Bab II memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019, Bab III memuat Tujuan dan Sasaran Bab IV memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021 Bab V Penutup.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019

Analisa atas capaian kinerja untuk masing – masing program dan sasaran kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

[illegible]

TUJUAN DAN SASARAN

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

1. Terwujudnya kemandirian peran karang taruna dibidang pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS
4. Meningkatnya pelayanan penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Rehabilitasi Sosial berbasis komunitas dalam panti guna mewujudkan PMKS yang sejahtera

2. Sasaran :

1. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara
2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
3. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat miskin pada komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar.
4. Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS .
5. Terlayannya, terlindunginya, dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya
6. Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;
7. Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat;
8. Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial;
9. Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan sosial
10. Membina dan mengembangkan peran bagi Karang taruna guna terciptanya kemandirian pada generasi muda
11. Pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti-panti sosial

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas kita harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dan mencari solusi untuk penyelesaian masalah.

1. Analisa Lingkungan Internal

Berdasarkan paparan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022, maka dapat diketahui bahwa aspek Kekuatan dan kelemahan pada Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Dukungan sumber daya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 22 orang dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

- SLTA : 6 orang, Diploma III/Sarjana Muda: 2 orang, Strata I/S1 : 13 orang dan S2 : 1 orang .
- Berdasarkan golongan II : 2 orang, Golongan III : 15 orang dan Golongan IV : 5 orang.
- Dengan pendidikan dan pelatihan penjenjangan yang telah diikuti pada Diklat PIM IV : 7 orang, PIM III : 4 orang dan PIM II : 1 orang.
- Tingkat jabatan : Eselon III : 5 orang, Eselon IV : 13 orang dan fungsional umum : 4 orang.
- Fasilitas penunjang : gedung dan perlengkapan
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana kantor seperti gedung kantor, kendaraan roda IV, kendaraan roda II, meja, kursi, lemari dan sejumlah perangkat computer dan laptop.
- Dukungan finansial melalui APBD II dan APBD I Provinsi NTT.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Dalam kerangka identifikasi lingkungan eksternal maka dapat dianalisa aspek opportunities / peluang sebagai pengaruh positif dan aspek threat / ancaman sebagai pengaruh negative terhadap perencanaan dan pengembangan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

a. Peluang

1. Adanya komitmen global, regional dan nasional tentang pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Adanya perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan bidang sosial.

3. Dukungan finansial pemerintah pusat dan Provinsi melalui dana APBN dan APBD I untuk pengentasan kemiskinan.

b. Tantangan

1. Kabupaten Flores Timur terdiri dari 3 pulau yaitu pulau Solor, Pulau Adonara dan Daratan Flores Timur berpotensi terhadap masuk keluarnya imigran gelap dan TKI ilegal yang dapat memicu timbulnya permasalahan kesejahteraan sosial.
2. Lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena tidak adanya kepastian dalam merealisasikan berbagai rencana yang telah diusulkan.
3. Masih kuatnya adat istiadat dan budaya lamaholot yang turut berpengaruh terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam penanganan permasalahan sosial.
4. Rendahnya sumber daya manusia akibat putus sekolah serta tidak diimbangi dengan adanya keterampilan kerja yang turut berpengaruh terhadap lambatnya proses pembangunan kesejahteraan sosial.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2021

Mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022, maka Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang diusulkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LO KASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
								NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
DINAS SOSIAL														9.335.015.975
1.06		Sosial			6.301.507.300						8.261.963.000			
x.		Program OPD			922.168.800						1.073.052.975			
x1.	1.06.1.06.0101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terdapatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	672.496.300				PP	100	747.188.225	Dinas Sosial		
	1.06.1.06.0101.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdapatnya jasa surat menyurat (Lembar Materai dan Pengalok)	900	3.650.000	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	900	4.015.000	Dinas Sosial		
	1.06.1.06.0101.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terdapatnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	58.890.000	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	12	55.000.000	Dinas Sosial		
	1.06.1.06.0101.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terdapatnya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/ operasional (unit)	11	36.525.000	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	5	40.177.500	Dinas Sosial		
	1.06.1.06.0101.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terdapatnya jasa administrasi keuangan (orang)	7	46.360.000	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	7	50.996.000	Dinas Sosial		

1.06.1.06.0101.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan Kantor (jenis)	18	2.734.250	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	18	3.007.673	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	35	34.999.000	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	45	65.000.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (jenis)	60.000	27.727.500	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	65000	35.000.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Alat kelistrikan) (jenis)	12	2.100.000	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	12	3.000.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan yang disediakan (jenis/Bulan)	1	1.800.000	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	1	2.000.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum kantor (orang) (makan, snack)	1.806	33.375.000	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	545 makanan, 430 Snak	49.000.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (Orang di Kab., Kupang dan Jakarta) (Kab)	185	156.565.000	Kab. Flores Timur - Kupang dan Jakarta	APBD II		PP	200	172.221.500	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran yang dibayai (Orang)	20	267.770.550	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	20	267.770.550	Dinas Sosial
x2. 1.06.1.06.0101.02	Program Pelelangan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur		219.672.500				PP		292.864.750	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	2	10.000.000	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	1	11.000.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	3	35.000.000	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	1	100.000.000	Dinas Sosial

1.06.1.06.0101.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	70.102.500	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	1	77.112.750	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersuplainya pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional (unit)	1	39.320.000	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	10	43.252.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	54	15.250.000	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	34	6.500.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.02.46	Pemeliharaan rutin/berkala tempat/monumen bersejarah	Tersedianya pemeliharaan monumen bersejarah (lokasi)	2	50.000.000	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	3	55.000.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan	6	30.000.000				PP	6	33.000.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.15.08	Pemberdayaan bagi Keluarga Fakir Miskin	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan	6	30.000.000	(Dinas Sosial, KAB. FLORES TIMUR)	APBD II		PP	6	33.000.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.15.16	Pemberdayaan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (MSP)	- Jumlah fakir miskin yang diberdayakan (Orang)	14.108	1.585.373.000	19 Kecamatan	APBD II	PN	PU I	100	350.000.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.15.17	Pendampingan pemberdayaan warga KAT	- Jumlah KUBE yang diberdayakan (KUBE)	5		Klabagolit, Ile Bura, Adonara Timur, Solor Barat, Ile mandiri, Larantuka, Wotan Ulumado Kecamatan Teteheha dan Kecamatan Ile Boleng	APBD II	PN	PU I	180	632.225.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.15.18	Bantuan stimulan bedah rumah penduduk (Fakir Miskin)	Jumlah keluarga Bermasalah Sosial Psikologis yang ditangani (orang)	25	125.000.000							
		Jumlah KK Warga KAT yang didampingin (KK)	45	62.479.000	Tanjung Bunga, Aramuna, Solor Timur, Tanah Werang, Solor Barat, Lamawalang	APBD II	PN	PU I	25	42.500.000	Dinas Sosial
		Jumlah KK yang menerima Bantuan stimulan Bedah rumah (KK)	10	100.000.000	Kec Adonara Barat: Desa Danitao, Kec. Sola: Desa Kalika, Kec. Tanjung Bunga: Desa Kolaka, Kec. Lewolima: Desa Balahebing, Kec. Solim: Desa Watohart.	APBD II	PN	PU I	50	800.000.000	Dinas Sosial

1.06.1.06.0101.15.19	Bantuan stimulan pembangunan rumah adat KAT	Jumlah Rumah adat yg diberikan bantuan (rumah adat)	2	150.000.000	Kec. Ile Boleng, Desa Nelelamawang, Kec. Lewolema, Desa Bantala.	APBD II	PN	PU I	2	325.999.500	Dinas Sosial
2, 1.06.1.06.0101.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)	100	1.396.843.000			PN	PU I	100	2.187.258.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.16.02	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban Eksploitasi, Perdagangan perempuan dan anak	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan sosialisasi terkait eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta tindakan kriminal lainnya (orang)	200	53.177.000	Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Adonara Barat	APBD II	PN	PU I	20	23.175.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.16.05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah Pelayanan psikososial bagi PMKS / Klien di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana (Klien/orang)	25	143.780.500	(Kelurahan Sarotari, Laranutuka)	APBD II	PN	PU I	25	199.650.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)	2.000	273.510.000	19 Kecamatan	APBD II	PN	PU I	2000	444.873.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.16.19	Pemberian bantuan bagi PMKS pada Panti dan Orsos	Jumlah Pantii/Yayasan Sosial yang mendapat Bantuan (Lembaga)	7	230.940.250	Kec Laranutuka: Kel. Waibulun, Kel. Weri, Kel. Sarotari Timur., Adonara Barat: Desa Duanur, Solor Barat: Desa Nusa Dani, Kec. Ile Mandiri. Desa Mudakeputu	APBD II	PN	PU I	322 Orang	427.735.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.16.20	Koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PKH (kali)	4		Kabupaten - Kupang - Jakarta.	APBD II	PN	PU I	4	495.000.000	Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.16.21	Rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia luar panti	Jumlah Lansia Luar Panti yang telah mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)	100	149.825.000	19 Kecamatan	APBD II	PN	PU I	150	274.825.000	Dinas Sosial

No	Kode	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Jenis Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Jumlah Sampel	Tahun Penelitian	Jenis Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Jumlah Sampel
3.	1.06.1.06.0101.17	Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini	2017	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100	2017	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100
4.	1.06.1.06.0101.18	Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini	2018	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100	2018	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100
5.	1.06.1.06.0101.19	Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini	2019	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100	2019	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100
6.	1.06.1.06.0101.20	Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini	2020	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100	2020	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100
7.	1.06.1.06.0101.21	Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini	2021	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100	2021	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100
8.	1.06.1.06.0101.22	Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini	2022	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100	2022	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100
9.	1.06.1.06.0101.23	Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini	2023	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100	2023	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100
10.	1.06.1.06.0101.24	Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini	2024	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100	2024	Penelitian kuantitatif	Kecamatan Gunung Sari	Survei	100

6. 1.06.1.06.0101.20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narkotika, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Penyandang penyakit Sosial yang ditangan- kan (%)	12	150.000.000	12	PP	12	166.375.000 Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.20.04	Pemberdayaan bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks Sosial yang diberdayakan (orang)	40	150.000.000	19 Kecamatan	PP	40	166.375.000 Dinas Sosial
7. 1.06.1.06.0101.21	Program Pemberdayaan Kecamatan Kesejahteraan Sosial	Persentase kegiatan sosial yang diberdayakan (%)	96,43	1.825.409.800		PN	97,43	1.728.250.000 Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Dunia Usaha dan masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan kegiatan sosial kejahteraan sosial (orang)	100	50.000.000	19 Kecamatan	PN	100	110.000.000 Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat yang diberdayakan (orang)	77	998.409.800	19 Kecamatan	PN	76	998.250.000 Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.21.05	Peningkatan nilai-nilai keperawatan, kejuangan, kepuhutan dan keselamatan sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan (Lembaga)	53	250.000.000	19 Kecamatan	PN	64	220.000.000 Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.21.07	Peningkatan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah masyarakat atau kesadran terhadap nilai-nilai bukan, jati diri dan kepuhutan bangsa (orang)	62	100.000.000	19 Kecamatan	PN	0	- Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.21.11	Peningkatan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Dokumen Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (DOKS) (Dokumen)	1	202.000.000	19 Kecamatan	PN	0	- Dinas Sosial
1.06.1.06.0101.21.13	Peningkatan Tagana (TAGANA)	Tagana yang difasilitasi (lembaga)	41	225.000.000	19 Kecamatan	PN	1	400.000.000 Dinas Sosial

BAB V

PENUTUP

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menyadari bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal. Untuk bisa menjawab berbagai tuntutan kebutuhan dan harapan masyarakat dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dihadapkan pada berbagai permasalahan terutama sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pembiayaan, dimana kemampuan keuangan daerah masih sangat terbatas. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam Rencana Kerja (Renja) ini menyadari belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan sangat diharapkan masukan dalam bentuk usul saran untuk menyempurnakan Renja ini.

Demikianlah Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dibuat dan diharapkan bermanfaat dalam perencanaan pengembangan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

Larantuka, 30 September 2020

Plt Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,

ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19670420 199703 1 008